

# FOKUS PERHATIAN

## "CIAT-CREK" DAN "PERISET POL" TIPE PERWIRA POLRI TAHUN 2000 ?

Oleh : Aswino

TULISAN Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dalam halaman VI "Suara Pembaharuan" tanggal 5 Oktober 1989 dan amanat (pesan) Kapolri dalam acara upacara Pembukaan Rakor Komuniti Litbang Polri tanggal 13 November 1989 kali ini menjadi fokus perhatian kita. Yang pertama berjudul "DIPERLUKAN TIPE POLISI LAIN UNTUK MENGHADAPI ABAD MENDATANG", yang kedua merupakan bagian penutup Kata Sambutan Jenderal Polisi Moch. Sanoesi; keduanya memiliki warna yang mengisyaratkan perlunya antisipasi saksama atas "nasib" Kepolisian Negara RI. Mungkin apabila tidak saksama, tidak cermat, kurang cepat dan tepat maka Polri baik sebagai institusi/kelembagaan, maupun selaku pelaku sejarah dalam perjuangan nasionalnya dengan segala peranan besarnya secara nasional serta internasional dibandingkan dengan Kepolisian di berbagai negara lain, bisa jadi justru dikedirikan eksistensinya.

Masalah-masalah strategis yang rawan selalu digarap oleh ke-11 sampai 17 Kelompok Kerja (Pokja) Pengkajian Lembaga Pertahanan

Nasional (Lemhannas) dengan orientasi Ketahanan Nasional yang berwawasan Nusantara. Akumulasi dan kristalisasi visi serta prediksi secara makro tertuang dalam Pokja Telaahan Strategi Nasional (Telstranas) per dekade yang selalu disempurnakan secara berkala. Dalam Telstranas 1989-1999, masalah "nasib" Polri dikaitkan dengan perkembangan tuntutan lingkungan strategik tidak/belum tersurat ataupun tersirat di dalam bab gatra Sosial-Budaya dan Hankam. Akan tetapi analog dengan sasanti kita bahwa "Nasib bangsa Indonesia tidak ditentukan oleh Luar Negeri melainkan oleh kita bangsa Indonesia sendiri", maka persepsi serta apresiasi ini kami sajikan.

### POKOK-POKOK PIKIRAN PROF. SATJIPTO.

Sejumlah perwira dan purnawirawan senior Polri yang berhasil penulis pantau telah tergelitik dan mencemaskan ucapan Sang Pakar yang selama bertahun-tahun telah menjadi Staf Pengajar Luar Biasa pada PTIK dan juga menjadi anggota Senat Akademi, karena justru berliaulah ilmuwan yang paling



peduli untuk menulis tentang kepolisian serta tentang Polri. Adapun pokok-pokok pikiran Prof. Satjipto Rahardjo adalah sebagai berikut: Pertama, dikaitkan dengan hasil-hasil Rapim Polri terakhir maka polisi lebih bersifat "civilian" dibandingkan ke-3 Angkatan lain. Untuk upaya pengembangan profesionalisme diperlukan profesionalisasi yang melibatkan Dunia Kampus (Kampus PTIK dan PTN/PTS terkait). Polisi pada suatu saat harus merupakan profil yang profesional birokrat dikombinir dengan kualifikasi intelek/inteligensia sebagai cendekiawan/ilmuwan. Untuk itu setiap anggota Polri tahun 2000-an harus merupakan tipe-tipe yang mampu meramu sendiri pengetahuan yang mereka terima ke dalam tugas pekerjaannya sehari-hari.

Kedua, proses menuju ke fase peningkatan profesionalisme dan kecendekiawan tersebut memerlukan penataan-penataan dan penelitian. Standard penerimaan Bintara Polri dari lulusan SLTA dinilai relevant dengan upaya profesionalisasi tersebut, sementara Akpol dan PTIK diberi beberapa catatan, di antaranya: Para Pengajar Akpol dan PTIK (dan yang berasal dari Undip dan UI yang sehari-harinya harus bekerja dengan standard pendidikan universiter itu harus putar kemudi untuk melakukan pekerjaan mendidik dengan tujuan praktis. Prof. Satjipto mensinyalir bahwa dunia pen-

didikan kepolisian masih belum sinkron dalam memberikan pengetahuan yang dibutuhkan dalam tugas polisi sehari-hari. Ketiga, dunia kini sudah semakin kecil sehingga tuntutan dimilikinya profesionalisme yang cangguh di tengah-tengah masyarakat dunia yang serba berubah dengan cepat, telah benar-benar mendesak. Oleh sebab itu proses spesialisasi profesi Polri harus segera dipersiapkan, dan Polri wajib mengikuti dengan saksama Pertemuan Internasional ke-22 di Roma yang membahas masalah menjadi polisi di abad ke-21.

Secara umum butir-butir yang diketengahkan oleh Prof. Satjipto begitu tulus dan berpenalaran. Akan tetapi ada kalimat yang beliau sendiri tidak memasukkan ke dalam kelompok yang ber "nilai positif". Maka itu seyogyanya pernyataan tersebut kita paparkan pula.

Keempat, . . . . . tampak bahwa mereka mengalami semacam transformasi dari dunia birokrat, otoriter, monolitik, masuk ke dalam dunia keilmuan yang lebih liberal. Polisi yang terbiasa hidup dalam suasana disiplin ABRI, sekarang dihadapkan kepada disiplin dan metodologi ilmu yang banyak melihat permasalahan secara relatif dan pluralistik. Transformasi seperti itu cukup penting bagi seorang perwira menengah ke atas. Pernyataan terakhir itulah yang agaknya menambah rasa cemas dan tergelitik kita semua,



khususnya para warga Polri senior.

## POKOK-POKOK ARAHAN KAPOLRI.

Dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat Litbang TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Puslitbang ABRI, para Pakar LIPI/BPPT dipimpin oleh Prof. Dr. Mochtar Buchori, dan para pejabat PTIK, Kapolri menyatakan sebagai berikut: Pertama, bahwa Litbang Polri harus menyerap upaya-upaya OPDIN/OECHO Polri (internal factors) dan OPDIN Lingkungan (global, regional, national level) yang menghadapi serbuan perkembangan Iptek (external factors), guna mendayagunakan hasil-hasil penelitiannya dalam kualifikasi/klasifikasi/stratifikasi sasaran-sasaran Operasional serta Pembinaan Polri.

Kedua, adalah tidak mungkin terjadi operasional dan pembinaan yang baik tanpa penelitian saksama. Oleh sebab itu mulai sekarang ditetapkan bahwa setiap Pamen Polri diharuskan membuat produk Pengkajian Terapan sebagai salah satu syarat penetapan/kenaikan, pangkat/karier/jabatan. Dengan demikian visi dan prediksi para Pamen akan terus terasah.

## PENALARAN.

Dari kedua pokok-pokok pikiran Pakar dan Pimpinan Polri tersebut terdapat butir yang sepenuhnya mau tak mau harus dijalankan yakni setiap Perwira Mene-

ngah Polri harus pandai mentransformasikan kecendekiawannya dengan profesionalismenya, yang oleh karenanya maka setiap Pamen wajib selalu melaksanakan analisis serta evaluasi (Anev) atas segala pelaksanaan operasionalnya serta pembinaannya, yang diwujudkan dalam hasil Pengkajian Terapan masing-masing. Dan agaknya penalaran Prof. Satjipto Rahardjo yang tulus serta universiter itu perlu memperoleh pengamatan mendalam lebih saksama.

## Polri lebih bersifat "civilian"?

Kalau benar Polri lebih bersifat civilian maka dalam rangka Dwi Fungsi ABRI semestinya lebih banyak Lurah/Kepala Desa/Bupati/Walikota sampai Gubernur yang berasal dari korsa Polri. Tidakkah lebih tepat apabila kita sebutkan bahwa tugas Polri "lebih civilian centris"?

Kini secara faktual timbul gejala/fenomena akibat budaya kepamongprajaan yang kini masih perlu pembenahan, yakni bahwa masyarakat/pamong justru lebih menyukai sifat-sifat yang "non-civilian". Periksa betapa lebih galak/beringasnya sikap-sikap petugas sekuriti yang justru non-ABRI/non-Polri.

Sifat militant bukan monopoli ABRI/Polri, demikian juga halnya sifat civilian bukan hanya milik masyarakat non-ABRI/Polri. Khusus untuk korsa Polri, jangan-jangan ucapan Prof. Satjipto tadi



diasumsikan untuk kemudian melegalisasikan kemungkinan bahwa korsa Polri ini boleh dikepalai oleh Pejabat Sipil/non-Polri atau bahkan mungkin saja oleh anggota Pengelola "Criminal Justice System" dan atau Pejabat ABRI lain!

**Pengajar Non-Akpol/Non-PTIK harus "putar kemudi"?**

Sejak lama PTIK telah menata penerapan konsepsi Bapak Presiden yang kemudian dalam dunia pembangunan perekonomian dicantumkan oleh Prof. Dr. Soemitro Djohadikoesoemo yang berbunyi "amal ilmiah serta ilmu yang amaliah". Bahkan oleh penyelenggara Penataran P-4 Tingkat Nasional (TMII-BP. 7) konsepsi tersebut telah dikembangkan dalam segala aspek kehidupan nasional, lebih mendalam daripada apa yang tertera dalam ke-36 petunjuk sikap dan tingkah laku seorang Pancasilais. Dan dalam benak kita termasuk di dalamnya Ilmuwan/Cendekiawan Pancasila.

Ilmu pada hakekatnya hanya pendekatan atas kebenaran belaka. Kebenaran itu sendiri hanya pada dan milik Tuhan Yang Maha Esa. Bumi ini adalah Bumi Pancasila. Masih haruskah di dalamnya ada "Pure Scientist"? Masihkah harus kita hidupkan kembali semboyan "I'art pour l'art" yang berkaca pada pengalaman pahit nasional kedua data tersebut telah digulingkan oleh ekstrimis

LEKRA/PKI sebelum tragedi nasional 1965? Haruskah para Pengajar Perguruan Tinggi berpedoman kepada tolok ukur klasik yang mendudukkan martabat Ilmuwan/Cendekiawan di atas "Menara Gading" sesuai dengan kalimat Prof. Satjipto yang berbunyi " . . . . . yang sehari-harinya harus bekerja dengan standard pendidikan universitas itu harus putar kemudi untuk melakukan pekerjaan mendidik dengan tujuan praktis"? Kalau saja ilmu dan keilmuan harus terpisah dari amal serta keamaliahan maka dapat dipastikan tidak akan pernah lahir tradisi penganugerahan Hadiah Nobel. Para penemu (discoverers ataupun inventors) ilmu atau embrio keilmuan tak akan pernah dipateri kisahnya dalam ensiklopedia. Terutama sejak jaman Renaissance (abad XIV) terlihat bahwa ilmu, keilmuan, serta ilmuwan hanya punya makna manakala ia membawa manfaat praktis bagi lingkungan dan umat manusia. Dan bahkan imajinasi ilmiah atau keilmiah pada hakekatnya merupakan motivator penemuan-penemuan baru sebagai embrio ilmu-ilmu baru. Cerita-cerita terkenal yang bernafaskan imajinasi ilmiah yang sering disebut "Science Fiction" disingkat SF bahkan tidak hanya melahirkan nama-nama besar beserta karya-karya besarnya saja, melainkan juga pengembangan imajiner untuk tujuan praktisnya. Langsung atau tidak langsung maka



Jules Verne telah mengilhami peristiwa besar sebagai lompatan raksasa (giant leap) pendaratan manusia pertama di bulan dengan karyanya yang berjudul "From the Earth to the Moon". Demikian juga halnya dengan bukunya "Twenty Thousand Leagues Under the Sea" telah mengilhami munculnya kapal selam bertenaga atom pertama "Nautilus". Bahkan "Unidentified Flying Object" atau yang lazim disebut "Piring Terbang" tidak terpisahkan dari tokoh Yahudi bernama Ezekiel putra Buzi. Lahirnya daftar sejumlah tokoh dunia sebagai pembaharu/pengubah dunia menunjukkan bahwa "bekerja dengan standard pendidikan universiter" tidak mesti diasingkan/dibeda-dipisahkan dengan "bekerja dengan standard pendidikan (PTIK pendidikan tinggi) yang bertujuan praktis/pragmatis". Manfaat hampir semua Ilmuwan Penemu Ilmu/Teori (bukan penemu "hanya" materi seperti atom, lampu pijar, dinamit, dan lain-lain) seperti Albert Einstein, Sigmund Freud, Bertrand Russell, dan lain-lain dirasakan sebagai anugerah praktis umat manusia.

Bahwasanya "Ilmu untuk Ilmu" itu tidak harus steril terbukti dengan dikembangkannya disiplin ilmu baru berikut sub-subdisiplinnya seperti Ecology, Futurology, Polemologi/Ilmu Perang dan Damai, serta "Ilmu Kepolisian" yang formalitasnya kedahuluhan oleh Ilmu Ketahanan Nasional. Pengem-

banan Ilmu Hukum sendiri yang tidak sekedar mendalami Civil Law, Common Law, Canon Law, Commercial Law, Constitutional Law, Criminal Justice (Law), International Law, Maritime Law, Military Law, Administrative Law, Environmental Law, dan sebagainya sampai dengan konvensi, amandemen, konsensus, dan lain-lain secara khusus belaka, akan tetapi jelas sebagai antisipasi atas tuntutan praktis/faktual yang aktual masyarakat.

Aneh sekali bukan manakala keluarga Ahli Pendidikan justru yang sering melakukan perbuatan biadab/tiada terpuji. Demikian pula halnya dengan keluarga Ahli Agama yang justru berbudaya kriminal "MA LIMA" (5-M: Main, Maling, Madon, Minum, dan Madat). Dan dalam periode "penayangan buronan dan koruptor lewat televisi" sekarang ini sungguh memprihatinkan bahwa pelanggaran hukum dan perundang-undangan justru banyak dilakukan oleh Ahli Hukum dan atau Penegak/Yang Tahu Hukum.

Masih ada sisi lain yang perlu kita sadari bahwa profesionalisme pun baru akan berhasil guna apabila ilmiah dan atau menurut sistem serta kesisteman. Sehubungan dengan itu profesionalisme yang diemban Polri tidak mungkin terpisahkan dari keilmuan yang universiter. Sebagaimana halnya tuntutan aspiratif "Demokrasi Pancasila" dalam Ilmu Politik atau



"Ekonomi Pancasila" dalam Ilmu Ekonomi, maka para Dosen kedua ilmu tersebut tidak harus "banting setir" untuk tujuan pragmatis. Sejalan dengan hal tersebut maka para Pengajar Undip, UI, dan sebagainya di PTIK atau Akpolpun TIDAK HARUS "putar kemudi" sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Satjipto.

Sisi lain yang justru mestinya menjadi fokus paparan Prof. Satjipto Rahardjo adalah bahwa baik PTIK maupun Akpol (juga pendidikan Polri yang lain yang dibedakan hanya secara stratifikatif) memiliki landasan jiwa kejuangan sebagaimana tersirat dalam semboyan filosofis "Dwi Warna Purwa, Cendekia Wusana", yang dalam sistem evaluasi kependidikannya merupakan hasil kristalisasi penilaian MENTAL/MORAL/MORIL-INTELEK/INTELIGENSIA-KESAMAPTAAN/KESEHATAN/FISIK yang terintegrasikan. Aplikasi kependidikan untuk membentuk/mewujudkan "Manusia Indonesia Seutuhnya" di Akpol dan PTIK telah lama dibudayakan.

**Polisi di Abad ke-21 Harus Universal?**

Di balik yang tersurat maka Prof. Satjipto berasumsi bahwa Polri abad mendatang "harus" mirip dengan tipe ideal Polisi Abad XXI sebagaimana dirumuskan dalam Pertemuan Kepolisian Internasional-XX di Roma bulan Oktober yang lalu. Beliau lupa bahwa

sejak kelahirannya pada awal Kemerdekaan RI, Polri adalah Pejuang/Prajurit Pejuang yang karena kekhasannya sebagai "bukan non-combatant" telah menyatakan tidak tunduk pada Konvensi Jenewa tahun 1949. Polri memang harus menyesuaikan diri serta mentransformasikan segala aplikasi dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Umum maupun khas Kepolisian, akan tetapi Polri tetap Korsa Pejuang.

**Polri birokrat, otoriter dan monolitik?**

Kalau benar Polri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ABRI diidentifisir demikian maka dapat dipastikan bahwa sample citra yang dipakai Prof. Dr. Satjipto Rahardjo adalah ABRI-Angkatan Perang, dan sumber analisis yang dipakai adalah hanya SAPTA MARGA dan SUMPAH PRAJURIT. Hakekat yang tersirat dalam TRI BRATA dan CATUR PRASATYA belum dilengkapkannya. Polri dengan sikap awal profesionalismenya sebagai warga negara utama yang sanggup menjadi panutan serta hamba hukum pencipta rasa tertib-tenteram-aman yang loyal kepada negara/bangsa/Pimpinan Bangsa dan Negara, sanggup setia dan taat kepada profesinya. Dengan demikian maka sejak kelahirannya Polri tidak menerapkan pengabdianya secara birokratis, otoriter, dan monolitik. Stabilitas Nasional dalam visi serta



prediksi Polri tetap "terciptanya masyarakat yang tata-tenteram-kerja-raharja"

Prinsip-prinsip Pimpinan Polri (Pola Pembinaan Polri Jenderal Awaludin, Rekonfu Jenderal Anton Sudjarwo, dan Opdin yang bertuntunan O-E-CH-O) merupakan satu mata rantai berkesinambungan yang luwes serta aspiratif untuk sebesar-besarnya ditujukan untuk lebih memantapkan nilai pengabdian profesionalismenya.

### Polri "kambing hitam"?

Dari ketidak tahuan baik intern di kalangan korsa maupun ekstern di luar korsa pasti akan lahir citra/image, yang untuk sementara Polri hampir selalu dipersalahkan atau dituding sebagai korsa yang bertanggung penuh atas segala jenis dampak negatif sekuriti pembangunan nasional, yang menyangkut ke-8 aspek kehidupan nasional RI.

Gali-menggali tanah untuk lahan pembangunan, gali-menggali jalanan umum untuk saluran telepon/air minum/saluran air limbah, dan lain-lain yang membuat jalanan macet, salah polisi. Lampu lalu lintas (traffic lights) padam dan semua orang tak patuh diatur yang membuat lalu lintas kacau, juga salah polisi. Kecelakaan lalu lintas dan bencana alam sering meledak dalam kuantitas maupun kualitas, biang-kejadiannya pun polisi yang dinilai terlalu gampang memberi SIM/

rekomendasi ke DLLAJR Dephub. u.p. Uji Kendaraan. Demikian pula atas berbagai dampak negatif yang timbul serta berkembang kebijakan/kebijaksanaan sejak awal tahun 1970, terutama sejak timbulnya pelbagai budaya sebagai berikut:

- Judi/perjudian mulai dari "hwa-hwe", ketangkasan, SDSB berikut judi buntutnya, permainan bilyard sampai dengan karaoke.
- Pusat Hiburan jual jasa yang cenderung menyatu dengan Industri Sex, diskotik, coffee shop, panti pijat, steambath/massage, healthcentre, pantai bursa sex Ancol, motel/hostel, show a la striptease di banyak gedung/restaurant/hotel; sampai dengan lokalisasi formal/legal dan informal/illegal tetapi ditanggung "safe" karena disponsori Pejabat.
- Budaya Med Club sejak akhir 1986 di Nusa Dua.
- Penyelundupan.
- Budaya kapitalistik "malu-malu".
- Berbagai kriminalitas canggih (komputer, bank berbunga tinggi, white collar crime, pembunuhan sadis, corporate crime yang telah semakin nampak (kasat mata, come into sight) nyata sebagaimana di bulan Desember 1989 ini telah beberapa kali diwaspadakan oleh Pimpinan Polri.



- Budaya korupsi serta sikap koruptif dalam setiap langkah kegiatan yang menyangkut dukungan dana, materiil, serta sarana yang menyertai unsur manusia sebagai subyek atau pelaku dengan segala heterogenitas mentalnya.

Ketujuh kelompok "budaya rawan" tersebut sudah kita identifikasi yang bahkan telah dilengkapi dengan lapis-lapis perundang-undangan yang diharapkan mampu menangkal akibat-akibat yang sudah telanjur negatif. Tetapi siapa pelaksananya? Siapa yang terkait serta siapa-siapa yang menjadi penanggung jawab utama yang mampu mengatur sekaligus menjatuhkan sanksi atas para pelaku yang tidak menurut aturan main? Simboyan KISS (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi), terpadu intersektoral, serta integralitas nampaknya masih bagaikan "bermulut di mulut orang" (membeo Atasan) belaka. Prakteknya masih lebih sering berlangsung berkotak-kotak serta "rezeki-oriented". Kalau kita dalam lebih lanjut, maka selain berdampak terhadap Trigatra, ke-7 kelompok butir budaya tersebut amat rawan dan mengganggu kemantapan Pancagatra sebagai kesatuan aspek dinamis Ketahanan Nasional bangsa Indonesia.

Jelas kiranya bahwa dampak eksistensi ke-7 fakta tersebut adalah tanggung jawab kita semua secara nasional, akan tetapi se-

tiap kali terjadi "ledakan peristiwa" yang berada dalam lingkup itu sekali lagi orang menuding: Polisi yang ini yang itu, yang kurang begini kurang begitu. Termasuk yang terakhir yakni munculnya vandalisme/hooliganisme supporters sepakbola Inggris yang diambil oper oleh supporters Indonesia di Semarang, Solo dan lain-lain (?). Dalam kericuhan di dua kota tersebut, Polisi kembali dipersalahkan sebagai "kurang tanggap" tanpa mau tahu bahwa panitia serta sponsor penyelenggara sudah membentuk satuan pengamanan sehingga Polisi dikondisikan hanya sebagai satuan tugas yang suplementer.

Dan kita jangan berpura-pura tidak tahu bahwa Polri pun telah dikambang hitamkan dengan adanya berbagai tindak kekerasan/perkelahian massal (periksa "Keras, Kasar, dan Beringas" di "Bhayangkara" nomor 010/1989 serta dalam berbagai dampak sekuriti pembangunan industri-industri, khususnya dampak luas pembangunan jalan-jalan raya/toll/bebas hambatan/layang berikut industri automotivenya.

#### **PROFESIONALISME YANG BERWAWASAN PROPORSIONAL.**

Tidak hanya Prof. Satjipto Rahardjo dan Kapolri saja yang mengisyaratkan wajib dikuasainya profesionalisme anggota Polri. Profesi apapun telah semakin dituntut untuk unggul dalam teknik,



taktik, maupun strategi. Profesi kepolisian yang dilukiskan oleh mantan Kapolri Jenderal Anton Sudjarwo sebagai "satu kakinya berpijak di kuburan" (siapa tewas dalam tugas) dalam upaya membekuk pelaku kejahatan maka Polisi diisyaratkan harus unggul dalam ber "ciaat" ucapan bahasa atau onomatope dalam bersilat, bergumul, bertinju, berbela diri ofensif) untuk kemudian menge "crek"-nya (membelenggu). Bahkan bila perlu, tanpa harus mengabaikan kritik kemanusiaan (antara lain Kompas Minggu tanggal 24-12-1989 yang menyatakan Polisi ditahun ini telah menembak 12 Tersangka, 4 di antaranya meninggal dunia), maka Polri memang diprofesionalkan untuk mampu ber-"Hunter/Matt Houston/Untouchable" menghadapi penjahat yang membawa alat pembunuh. Meskipun demikian profesionalisme polri tetap berpijak pada identitasnya selaku Prajurit Pejuang dan bagian yang tidak terpisahkan dari ABRI. Dan selama kebijakan dan keinginan Pimpinan Nasional cq Pimpinan Hankam/ABRI masih konsekuen serta konsisten, maka kecemasan para Perwira Senior Polri atas eksekusi pokok-pokok pikiran Prof. Dr. Satjipto Rahardjo tersebut agaknya untuk sementara boleh dikesampingkan.

Di atas telah dikemukakan tentang arahan Kapolri wajib dilakukannya kegiatan penelitian lapangan (terapan) bagi Pamen dengan

sasaran operasional serta pembinaan, yang sekaligus memperhatikan baik faktor internal maupun eksternal sesuai dengan kualifikasi/klasifikasi/stratifikasi, sehingga segala sasaran dapat dilaksanakan sesuai dengan lingkup wawasannya. Apakah dalam tingkat manajemen Bawah, Menengah, ataukah tingkat Tinggi. Arahan Kapolri tersebut wajib terus dikembangkan sehingga persyaratan penelitian terapan bagi setiap Pamen tidak lari dari wawasan manajerial sesuai lingkup/porsi/proporsi profesi Polri. Arahan Kapolri tersebut sejalan dengan bayangan Pamen Polri menurut Prof. Satjipto yakni Pamen yang mampu mentransformasikan apa yang kini telah dilakukan oleh Polri dengan dunia keilmuan yang lebih liberal.

Satu hal yang mencengangkan adalah tampilnya sambutan serta ulasan Kapuslitbang ABRI dalam kaitannya dengan sasaran Rakor Komuniti Litbang Polri tanggal 13-18 November 1989 tersebut. Selain memperkuat pokok-pokok arahan kelitbang Pimpinan Polri, Kapuslitbang bahkan membukakan cakrawala pengelolaan berikud dukungan pendanaannya. Dengan DUK/DUP yang diinformasikan kepada Puslitbang ABRI maka segala kegiatan Litbang Polri cq. dukungan dananya diisyaratkan dapat dibantu oleh Puslitbang ABRI selaku koordinator.

Ketercengangan hadirinpun tak terelakkan atas kekurangan daya



Litbang Polri yang secara terbuka diketahui oleh lembaga-lembaga Litbang di luar Polri yang dengan tekun hadir sebagai Peninjau/Undangan.

Dari paparan di atas maka hadirnya Pamen Polri khususnya serta anggota pada umumnya yang profesional mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan Iptek serta kemanusiaan mengharuskan setiap insan Polri langkah-langkah non-operasional. Dia wajib sebanyak mungkin mengidentifisir data yang terkumpul untuk diolah, diteliti secara mandiri dan atau secara komparatif untuk kemudian disimpulkan guna pengembangan pemantapan kegiatan operasional di lapangan; sekaligus pemantapan bidang pembinaan profesi sesuai lingkup menejerialnya. Khusus perihal Pamen Polri maka setapak demi setapak wajib sudah memasuki budaya kerja sebagai "Applicative Researcher" atau Periset Terapan Polri.

### **MEMENUHI HARAPAN LINGKUNGAN.**

Sadar akan mutlak perlunya penerapan visi serta prediksi yang apresiatif (bukan selalu reaktif) atas perkembangan tuntutan pelaksanaan pembinaan Kamtibmas, Garbha Wiyata Luhur Bhayangkara (PTIK) tiada henti-hentinya melangkah menuju realisasi prinsip "amal yang ilmiah, serta pengembangan ilmu yang amaliah". Makna kecendekiawanan tidak pernah

ditampilkan sebagai "opposant" profesionalisme. Untuk itu berbagai wadah/wahana untuk berkoordinasi, konsolidasi, konsultasi, serta penelitian pengembangan telah ditempuh untuk diisi. Hasilnya dijadikan pemantap pembekalan bagi para Mahasiswa PTIK serta sebagai masukan bagi Pimpinan Polri.

Kerjasama keilmuan dengan PTN dan para Pakar telah secara aktual diamaliahkan dalam pelemagaan kerjasama dengan ASURANSI JIWA BERSAMA (AJB) "BOEMI POETERA 1912", serta dengan ASOSIASI PROFESI SEKURITI INDONESIA (APSI).

Dan menyongsong masuk ke tahun 1990 maka PTIK pada tanggal 27 Desember 1989 akan membahas untuk kedua kalinya produk-produk awal perihal ANALISIS DAMPAK SEKURITI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL (PROGRAM PELITA V), bersama para Pakar PTN-PTS, LIPI/BPPT, Pimpinan Media Massa, dan Tokoh terundang lainnya sekitar 34 (tigapuluh empat) orang. Apa dan bagaimanapun hasilnya pasti akan lebih memantapkan prinsip sosok Polri hari esok, yakni yang beramal ilmiah yang sekaligus yang berilmu amaliah.

Kiranya langkah ini memenuhi harapan lingkungan strategik masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak dan kewajiban berbangsa dan bernegara ini.